

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterwakilan Perempuan dalam politik merupakan sesuatu yang penting untuk mengedepankan berbagai permasalahan sosial termasuk kesetaraan gender. Hal ini menjadi perhatian di bidang politik di berbagai belahan dunia. Dalam negara demokrasi, keterwakilan Perempuan perlu ditingkatkan untuk mengurangi defisit demokrasi. Demokrasi yang berhasil ditandai dengan didukungnya kesetaraan budaya, agama, etnis, dan ketaraan gender dalam suatu negara. Keterwakilan perempuan dalam politik telah mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa dan Amerika. Namun, kondisi ini bervariasi antar negara dan wilayah, dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, kebijakan, dan sejarah sosial-politik masing-masing.

Di belahan dunia Eropa, secara umum dikenal sebagai wilayah dengan tingkat keterwakilan perempuan yang relatif tinggi dalam politik, terutama di negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat. Eropa memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak politik, termasuk hak pilih. Negara-negara di Eropa umumnya memiliki tingkat keterwakilan perempuan dalam politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di benua lain (Tomasoni, 2024). Beberapa negara di Eropa bahkan telah mencapai tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen yang mendekati 50%. Selain Eropa, di belahan dunia Amerika tingkat keterwakilan perempuan dalam politik bervariasi antar negara dan wilayah. Secara umum, tingkat keterwakilan perempuan dalam politik di Amerika lebih rendah dibandingkan dengan di Eropa (Vallejo, 2024).

Tabel 1.1 Tingkat Keterwakilan Perempuan di beberapa Negara Eropa dan Amerika

Negara	Tingkat Keterwakilan Perempuan di Parlemen (%)	Tahun
Norwegia	44,4%	2021
Swedia	46,7%	2022
Finlandia	46,0%	2023
Amerika Serikat	28,7%	2024
Kanada	30,6%	2021
Argentina	42,4%	2023

Sumber: Inter Parliamentary Union (IPU)

Table diatas menunjukkan keterwakilan perempuan dalam politik di beberapa negara Eropa dan Amerika memiliki tren yang beragam. Meskipun terdapat kemajuan di beberapa negara, masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Upaya-upaya seperti penerapan *affirmative action*, peningkatan kesadaran masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian kesetaraan gender dalam politik dan memberikan suara yang lebih besar bagi perempuan dalam membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif (Cascio & Shenhav, 2020).

Meningkatnya keterwakilan Perempuan dalam politik di berbagai negara Eropa dan Amerika didorong oleh berbagai faktor. Di Eropa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan keterlibatan Perempuan dalam politik, seperti budaya politik yang lebih inklusif dan terbuka terhadap Perempuan dan adanya jaringan dan organisasi Perempuan yang kuat (Ilmu & Febriana, 2021). Contoh organisasi Perempuan di Eropa adalah International Council of Women (ICW), International Woman Suffrage Alliance (IWSA) dan Women's Women's Suffrage Alliance (WSA). Sedangkan di Amerika, meningkatnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen dan senat juga didasari oleh berbagai faktor. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya partisipasi Perempuan dalam politik adalah faktor yang paling utama (Setiyaningsih, 2022). Selain itu, Gerakan Perempuan yang kuat seperti Women's Political Union juga mempengaruhi keterlibatan Perempuan dalam politik. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik di Eropa dan Amerika merupakan hasil dari perjuangan panjang gerakan perempuan dan berbagai pihak yang mendukung kesetaraan gender.

Di benua Asia, isu kesetaraan gender dalam politik masih menjadi perbincangan hangat. Keterwakilan perempuan dalam politik di Asia menunjukkan tren peningkatan, namun masih jauh dari target kesetaraan gender (Aldamiz-Echevarría et al., 2017). Menurut Inter-Parliamentary Union (IPU), rata-rata global keterwakilan perempuan di parlemen Asia pada tahun 2023 adalah 25,5%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 26,1%. Namun, terdapat variasi yang signifikan antar negara di Asia, dengan beberapa negara seperti Timor Leste (38,5%) dan Filipina (28%) memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dibandingkan dengan Eropa dan

Amerika, Asia masih mengalami peningkatan keterlibatan Perempuan yang masih cukup rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor Sejarah, budaya, sosial, dan politik. Norma dan stereotip gender yang masih membatasi peran Perempuan di ruang publik di beberapa negara Asia menjadi hambatan bagi Perempuan untuk maju dalam bidang politik (Jung, 2024).

Perbedaan keterwakilan perempuan dalam politik di Asia, Eropa, dan Amerika, seperti yang dijelaskan sebelumnya, memang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, termasuk faktor sejarah, budaya, sosial, dan politik. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan perbedaan ini adalah teori agama Islam tentang kepemimpinan perempuan. Dalam Islam, terdapat berbagai pendapat tentang kepemimpinan perempuan, baik secara politik maupun agama. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, khususnya dalam bidang politik dan agama. Mereka mendasarkan argumen mereka pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mereka interpretasikan sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin (Aneeq, 2024). Teori tersebut memang salah satu faktor yang dapat memengaruhi situasi di beberapa negara, namun bukan satu-satunya faktor. Penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memahami situasi di setiap negara dan konteks.

Di Indonesia sendiri, penting untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan dalam politik, khususnya dalam kursi parlemen. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minimal 30% dalam kursi parlemen negara Indonesia. Afirmasi keterwakilan Perempuan dalam ranah politik adalah kebijakan yang sudah dilahirkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Perpu). Perpu yang terbaru yakni UU Nomor 7 Tahun 2023 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pada UU tersebut dalam Pasal 173 ayat 2 E menyatakan “menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Pasal 245 menyebutkan pula bahwa daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Di tingkat ASEAN, pada tahun 2023 Indonesia dalam konteks keterwakilan

Perempuan dalam parlemen masih tergolong rendah karena masih menduduki peringkat ke-6 dengan presentase 20,3%

Secara historis, perempuan di Indonesia telah mengalami perjuangan panjang untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik dan pemilu. Sejak era pergerakan nasional, tokoh-tokoh perempuan seperti Rasuna Said, Maria Ulfah Santoso, dan Sukanti Suryoputri telah memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Namun, keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat terbatas hingga era Reformasi bergulir pada tahun 1998. Pada era reformasi, demokratisasi yang dijalankan serta merta membuka kesempatan bagi kaum wanita Indonesia untuk memperjuangkan kembali kesetaraan gender di setiap tingkat (Fadli, 2017). Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan kesetaraan gender dan perlunya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong partisipasi politik perempuan.

Partai politik sebagai wadah aspirasi Masyarakat, sekaligus sebagai penampung atau pengkaderan Masyarakat sebagai calon anggota Lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD. Maka partai politik memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlanjutan perjuangan kepemimpinan bagi negara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai politik Islam di Indonesia memiliki komitmen untuk mendorong partisipasi Masyarakat termasuk perempuan dalam bidang politik. Namun, partisipasi perempuan dalam politik, khususnya di tingkat legislatif, masih terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah stigma dan norma sosiokultural yang dikaitkan dengan teori Islam tentang kepemimpinan perempuan.

Tabel 1.2 Jumlah Kemenangan PKB di DPR-RI tahun 2014-2024

Tahun Pemilu	Jumlah Kursi DPR-RI	Peringkat	Persentase Suara Nasional
2014	47 Kursi	Ke-7	8,43%
2019	52 Kursi	Ke-6	9,69%
2024	58 Kursi	Ke-5	10,09%

Sumber: Laman website KPU RI

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PKB mengalami peningkatan perolehan kursi di DPR RI pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019, PKB berhasil meraih 52 kursi di DPR RI, naik dari 47 kursi pada Pemilu 2014. Peningkatan ini menunjukkan bahwa PKB semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dalam konteks Kota Malang, keterwakilan Perempuan dalam parlemen memiliki kuota 14/45 kursi. Meskipun demikian, pencapaian keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum memuaskan. Dalam pemilu DPRD Kota Malang tahun 2014, hanya terdapat 12 anggota legislatif perempuan dari total 45 kursi yang diperebutkan. Angka ini masih belum mencapai target 30% yang diamanatkan dalam undang-undang.

Tabel 1.3 Jumlah Kursi Perempuan di Parlemen Kota Malang

Tahun Pemilu	Jumlah Kursi DPRD	Jumlah Legislatif Laki-laki	Jumlah Legislatif Perempuan	Persentase Perempuan
2014	45	37	8	17,80%
2019	45	33	12	26,70%
2024	45	33	12	26,70%

Sumber: Laman website KPU RI

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah legislatif perempuan di Kota Malang mengalami peningkatan dari 8 orang pada tahun 2014 menjadi 12 orang pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dalam partisipasi perempuan dalam politik di Kota Malang. Namun, persentase perempuan di DPRD Kota Malang masih tergolong rendah, yaitu 17,8% pada tahun 2014 dan 26,7% pada tahun 2019 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di Kota Malang.

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur dengan populasi yang heterogen. Kota ini dikenal dengan sebutan "Kota Pendidikan" karena banyaknya institusi pendidikan yang berkualitas. Selain itu, Malang juga dikenal sebagai kota yang kaya akan budaya dan tradisi, serta memiliki sejarah panjang dalam pergerakan sosial dan politik. Keberagaman etnis, agama, dan latar

belakang sosial ekonomi masyarakat Malang menciptakan sebuah mosaik sosial yang kompleks. Dinamika sosio-kultural ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga mempengaruhi proses politik dan kebijakan di kota ini. Selain itu, partisipasi perempuan dalam politik, khususnya di tingkat legislatif, masih terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah stigma dan norma sosio kultural.

Sosio-kultural di Kota Malang mencakup berbagai aspek seperti nilai-nilai tradisional yang masih kuat, keberagaman etnis dan agama, serta adanya komunitas akademis yang kritis dan progresif. Nilai-nilai tradisional, yang seringkali masih didominasi oleh pandangan patriarki (Sangidu et al., 2024), bisa menjadi hambatan bagi perempuan yang ingin berperan aktif dalam politik. Selain itu, pluralitas etnis dan agama menuntut adanya pendekatan inklusif dan sensitif dalam berpolitik, untuk memastikan bahwa kepentingan semua kelompok dapat terwakili dengan baik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Malang merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Per tahun 2023 dari 880.787 jiwa, terdapat 797.002 jiwa yang menganut agama Islam.

Kepemimpinan Perempuan termasuk dalam politik menurut perspektif islam masih menjadi persoalan hingga saat ini. Sebagian dari Masyarakat masih memandang Perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mendahului laki-laki. Dilain sisi, banyak buku-buku dan penelitian tentang pentingnya kepemimpinan Perempuan. Plato mengatakan bahwa tidak ada namanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, dari segi kemanusiaan. Apabila kaum perempuan hanya diibaratkan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus suami dan mendidik anak saja maka, kaum perempuan selalu akan tertindas. Dokrin budaya patriarki ini masih sangat kuat di kalangan Masyarakat. Namun, persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang penting karena menentukan keberlanjutan sebuah kelompok.

Dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai politik Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. PKB juga berkomitmen untuk mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Sedangkan dalam teori islam yang ditulis oleh (Ibnu Rusyd; Achmad Zirzis Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid .,

2016.). Dalam Islam, terdapat berbagai pandangan dan interpretasi tentang kepemimpinan perempuan. Beberapa mazhab Islam seperti Hanafi dan Maliki melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik karena dianggap tidak memiliki kekuatan fisik yang diperlukan untuk menjadi pemimpin, termasuk sebagai anggota legislatif. Argumen yang digunakan untuk mendukung larangan ini adalah bahwa perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan dan kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam memimpin (Hoque & Islam, 2022). Pandangan ini didasarkan pada teks-teks agama tertentu, seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin atas laki-laki.

Tabel 1.4 Jumlah kemenangan PKB di DPRD Kota Malang

Tahun Pemilu	Jumlah Kursi PKB	Persentase Kursi PKB	Jumlah Legislatif Laki-laki PKB	Jumlah Legislatif Perempuan PKB	Persentase Perempuan PKB
2014	7 Kursi	15,56%	7 Orang	0 Orang	0%
2019	7 Kursi	15,56%	6 Orang	1 Orang	14,29%
2024	8 Kursi	17,78%	6 Orang	2 Orang	25%

Sumber: Laman website KPU Kota Malang

Tabel di atas terlihat bahwa PKB berhasil mempertahankan jumlah kursinya di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014. Pada tahun 2019, PKB berhasil meraih 7 kursi di DPRD Kota Malang, sama dengan perolehan kursi pada Pemilu 2014. Meskipun jumlah kursinya stagnan, PKB mengalami sedikit peningkatan dalam persentase kursi, yaitu dari 15,56% pada Pemilu 2014 menjadi 17,78% pada Pemilu 2019. Dari segi perbandingan laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa pada Pemilu 2014, PKB tidak memiliki legislatif perempuan di DPRD Kota Malang. Namun, pada Pemilu 2019, PKB berhasil meloloskan satu orang perempuan untuk menjadi legislatif di DPRD Kota Malang. Pada tahun 2024, PKB berhasil mengantarkan kadernya sebanyak delapan orang dalam kursi parlemen, yang dua orang diantaranya adalah legislatif perempuan. Meskipun demikian, persentase perempuan PKB di DPRD Kota Malang masih tergolong rendah, yaitu 14,29%. Penelitian ini berfokus pada strategi yang diterapkan oleh dua tokoh perempuan PKB, Ike Kisnawati dan Putri Aidillah, dalam

memenangkan kontestasi politik di Kota Malang. Keduanya mencerminkan semangat pemberdayaan perempuan di tengah tantangan struktural dan budaya patriarki.

Kajian mengenai strategi anggota legislatif perempuan Kota Malang dari PKB pada Pemilihan Legislatif 2024 ini akan mendalami taktik-taktik khusus yang digunakan para kandidat untuk meraih simpati dan dukungan dari para pemilih yang akan memeriksa bagaimana mereka menyampaikan pesan yang mempromosikan kesetaraan gender sambil secara bersamaan menangani masalah politik lainnya. Penelitian ini akan menyoroti strategi dan pendekatan yang berhasil memenangkan pemilihan dan menjalin hubungan dengan pemilih. Hal tersebut akan berkontribusi pada basis pengetahuan tentang kampanye politik partai Islam dan membantu memberdayakan lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik dengan memberi mereka panduan berharga dan pelajaran yang dipetik dari kandidat yang berhasil.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi legislatif perempuan PKB dalam memenangkan kontestasi politik di Kota Malang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

- a. Untuk mengidentifikasi strategi keberhasilan yang dilakukan kandidat DPRD perempuan terpilih dari PKB pada Pemilihan Legislatif Kota Malang Tahun 2024.

1.3.2 Manfaat

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu politik serta juga menambah informasi bagi peneliti dan pembaca, terkait strategi politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terutama dalam menghadapi sosio kultural di Kota Malang.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman keselarasan yang lebih tentang pentingnya kesetaraan *gender* dalam politik oleh Partai Kebangkitan

Bangsa yang berlawanan dengan teori Islam bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber berharga bagi mahasiswa yang tertarik pada studi *gender*, ilmu politik, dan pemberdayaan perempuan yang memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh calon legislatif perempuan dan strategi yang mereka gunakan dalam kampanye politik, menawarkan studi kasus untuk dianalisis dan didiskusikan.

2) Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi civitas akademika dengan menambah pengetahuan tentang kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan, dan strategi kampanye yang meningkatkan reputasi universitas sebagai pusat penelitian dan keahlian di bidang ini.

3) Bagi Kandidat Legislatif Perempuan

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis yang bermanfaat dan wawasan berharga bagi kandidat perempuan tentang strategi kampanye sukses yang digunakan oleh para kandidat perempuan pada Pemilihan Legislatif DPRD Kota Malang tahun 2024 yang dapat memandu mereka dalam merencanakan kampanye caleg dan memungkinkan mereka menjadi lebih strategis dan efektif dalam memperoleh simpati dan dukungan dari para pemilih ditengah tantangan sosio kultural.

1.4. Definisi Konseptual

Definisi konseptual strategi penelitian kandidat perempuan dari PKB pada Pemilu Legislatif Kota Malang 2024 berkisar pada kajian sistematis tentang taktik, pendekatan, dan metode yang digunakan kandidat perempuan untuk mengamankan suara dan dukungan pemilih yang melibatkan eksplorasi variabel kunci yang

membentuk strategi kampanye mereka dan pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan atau tantangan pemilu mereka.

1. Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan Perusahaan (Handayani & Aris Eddy Sarwono, 2021). Strategi merupakan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, strategi mengacu pada cara-cara yang digunakan oleh politisi perempuan PKB di Kota Malang untuk memenangkan Pemilu DPRD Tahun 2024.

Strategi politik menurut pendekatan Peter Schroder dalam kajian (Sewitri et al., 2024), dalam kerangka kerja analisis sistem politiknya, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana strategi politik dapat dianalisis dan dipahami. mencakup beberapa elemen kunci yang menggambarkan interaksi dinamis antara strategi defensif, ofensif, Positioning, dan marketing dalam konteks sistem politik

2. Perwakilan Perempuan dalam Politik

Perwakilan Perempuan dalam politik merujuk pada perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum untuk menjadi anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah serta Perempuan yang menjadi anggota dan kader partai politik dan terlibat dalam kegiatan politik, khususnya di Kota Malang. Kriteria politisi Perempuan harus memenuhi beberapa kriteria seperti: terdaftar sebagai anggota parpol di Kota Malang, aktif dalam kegiatan politik, dan mencalonkan/terpilih sebagai anggota DPRD periode 2024-2029.

Sebagai seorang legislatif, perempuan ini memiliki komitmen yang kuat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, hak perempuan, dan pemberdayaan perempuan. Mereka berupaya untuk mewakili kepentingan perempuan dalam perumusan kebijakan publik dan memperjuangkan keadilan gender di dalam lembaga legislatif.

3. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilu legislatif merupakan proses pemilihan anggota legislatif atau DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pangestu, 2022). Pemilih adalah Masyarakat yang sudah memiliki hak pilih kepada peserta pemilu legislatif atau kandidat legislatif yang diajukan oleh partai.

Pemilu DPRD Kota Malang Tahun 2024 menjadi fokus penelitian ini. Hal ini mencakup proses pencalonan dan kampanye untuk memenangkan kontestasi politik anggota DPRD Kota Malang, serta peraturan dan perundang-undangan terkait Pemilu DPRD.

1.5. Definisi Operasional

Untuk lebih lanjut memudahkan pemahaman mengenai pelaksanaan operasionalnya dalam penelitian ini, maka peneliti akan merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut (Setyaning et al., 2022), strategi politik melibatkan penggunaan strategi dan teknik pemasaran yang digunakan dalam pemasaran produk atau jasa untuk memasarkan kandidat politik. Strategi politik yang dilakukan politisi Perempuan PKB dalam melakukan kampanye menjelang kontestasi politik di Kota Malang dengan tantangan sosio kultural yang ada.
 - a. Strategi Defensif yang digunakan anggota legislatif perempuan PKB Kota Malang untuk mempertahankan basis dukungan yang sudah ada.
 - b. Strategi Ofensif yang digunakan anggota legislatif perempuan PKB Kota Malang untuk memperluas kantong suara dan mendapatkan pemilih baru.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif kekuatannya bukan pada data dan analisis statistik, tapi pada deskripsi. Kemampuan penelitian untuk menjelaskan fenomena untuk menangkap makna secara mendalam (Rianto, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi kampanye yang digunakan oleh calon anggota legislatif perempuan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

atau kegagalan strategi tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam dari variabel dan faktor yang mendasarinya dengan melibatkan melakukan wawancara atau kelompok fokus dengan caleg perempuan yang lolos dalam kontestasi politik DPRD Kota Malang 2024. Data kualitatif dapat memberikan deskripsi dan narasi yang kaya yang meningkatkan pemahaman tentang strategi kampanye.

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Didapatkan dari wawancara dengan legislatif Perempuan terpilih yang terlibat dalam proses pemilu. Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber-sumber utama ini memberikan wawasan langsung tentang strategi, pengambilan keputusan, dan pengalaman kandidat.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dengan laporan kegiatan politik, materi kampanye, dan laporan Komisi Pemilihan Umum yang dapat memberikan informasi tentang strategi yang digunakan partai politik untuk mendukung kandidat legislatif Perempuan yang diusung. Selain itu, studi literatur tentang gender dan politik, strategi kampanye, dan dinamika pemilu dapat berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk memberikan kerangka teori, analisis data, dan wawasan ke dalam konteks topik penelitian yang lebih luas.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Melakukan wawancara dengan caleg Perempuan atau perwakilan partai yang terlibat dalam proses pemilu. Wawancara ini dapat

terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian. Wawancara memberikan data kualitatif dan memungkinkan eksplorasi mendalam tentang strategi kampanye sukses dan pengalaman kandidat.

2. Analisis Data

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan seperti laporan kegiatan politik, materi kampanye, dan laporan pemilu. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan tentang strategi kandidat dan hasil pemilu.

